

ANALISIS FLUKTUASI NILAI TINGKAT SUKU BUNGA DALAM NEGERI, SUKU BUNGA LUAR NEGERI, PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL ASING SEKTOR PERINDUSTRIAN DI JAWA TENGAH 2013

OLEH:

WACHJUNI, RATNA KUSUMAWATI, NANANG YUSRONI

ABSTRAKSI

Pemerintah Jawa Tengah membutuhkan modal karena adanya kelangkaan, salah satunya melalui penanaman modal asing sektor perindustrian. Namun penanaman modal asing di Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yaitu naik-turunnya nilai-nilai Penanaman modal asing selama tiga kwartal terakhir. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat suku bunga luar negeri, dan pengeluaran pemerintah.

Tingkat suku bunga dalam negeri memegang peranan penting dalam menciptakan modal asing karena investor hanya akan menanamkan modalnya apabila memberi keuntungan baginya terutama bagi investor asing yang tidak menanamkan modal sendiri sepenuhnya namun meminjam dari bank. Tingkat suku bunga luar negeri juga memberi peranan penting, apabila tingkat suku bunga luar negeri yaitu *Libor (london inter bank offer rate)* meningkat akan memberi dampak positif terhadap penanaman modal asing. Penelitian ini menguji suku bunga dalam negeri pada tingkat pinjaman dengan uji statistik. Dengan adanya analisis tersebut maka dapat di harapkan dijadikan acuan oleh Pemerintah Jawa Tengah untuk menarik investor asing.

Kata kunci : modal asing, industri, suku bunga dalam negeri, suku bunga luar negeri

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riya Suharnata dengan mendasarkan data runtut tahun 1969-1990 menyimpulkan bahwa penanaman modal asing memiliki hubungan yang positif dengan tingkat bunga internasional, selain itu Adhita Prawatyo dalam "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia" mengatakan bahwa investasi swasta di Indonesia baik PMA maupun PMDN ditentukan oleh variabel tingkat suku bunga, baik di dalam maupun di luar negeri, demikian juga Suparmoko dalam "keuangan negara" mengatakan semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional, sehingga penelitian ini melihat pada pengaruh tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat suku bunga luar negeri, pengeluaran pemerintah terhadap penanaman modal asing di Jawa Tengah.

Penanaman Modal Asing di sektor perindustrian sebagai sumber dana pendukung pembangunan di Jawa Tengah selama ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 Pada tahun 2001 sampai tahun 2011 nilai PMA menurun terus sampai angka 35,071 ribu US \$ kemudian tahun berikutnya meningkat sebesar 80,902 ribu US \$, tetapi tahun berikutnya menurun lagi menjadi 46,234 ribu US \$, turun-naiknya nilai Penanaman Modal Asing itu terjadi sampai tahun 2011. Fluktuatif itu seharusnya tidak perlu terjadi sebab pemerintah telah mengeluarkan deregulasi dan debirokratisasi selama ini untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi asing, misalnya Paket 21 November 1988 tentang deregulasi dibidang angkutan laut, Paket kebijakan 28 Mei

1990 tentang penyederhanaan tata niaga ekspor kayu, sayur-mayur, rempah-rempah disertai pemangkasan tarif impor, deregulasi dibidang kesehatan dan deregulasi PMA dalam bidang farmasi dan pertanian, dan lain-lain.

Tabel 1.1 Nilai PMA yang telah disetujui oleh Pemerintah pada sektor Perindustrian di Jawa Tengah (dalam ribu US \$).

TAHUN	TOTAL
2001	569,310
2002	255,736
2003	35,071
2004	80,902
2005	46,234
2006	124,506
2007	852,238
2008	1,955,054
2009	3,064,820
2010	109,644
2011	59,682

Sumber:Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa tengah

Mengenai faktor tingkat suku bunga, suku bunga yang tinggi dapat merupakan hambatan bagi pertumbuhan swasta maupun publik, oleh karena itu tingkat suku bunga rendah merupakan syarat penting untuk mendorong investasi swasta. Investor menanamkan modalnya untuk memproduksi barang dan jasa dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang (Jhingan, 1993). Pengeluaran Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam anggaran pembangunan APBD merupakan langkah penyediaan prasarana / fasilitas (infrastruktur) yang sangat dibutuhkan oleh pelaku bisnis, seperti jalan / jembatan, instalasi listrik, pelabuhan maupun yang lainnya. Pemerintah seharusnya lebih bertindak sebagai fasilitator dan penyedia jasa publik yang akan dapat menjamin *social security*, *social protection* penduduk, dan bukanlah menjadi motor atau pelaku pembangunan ekonomi yang terjun langsung di pasar (Anton H.Gunawan, 1999).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Jawa Tengah saat ini : Mengapa nilai Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah mengalami fluktuasi (naik-turunnya nilai PMA selama satu dasawarsa terakhir) dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat suku bunga luar negeri, dan pengeluaran pemerintah terhadap penanaman modal asing sektor perindustrian di Jawa Tengah selama periode tahun 2001-2011.

Luaran penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan baik untuk sektor moneter maupun sektor riil .
2. Sebagai pelengkap dan penambah khasanah tentang penelitian ekonomi, khususnya tentang Penanaman Modal Asing (Pemerintah maupun swasta).
3. Untuk mempraktekkan ilmu dan teori-teori ekonomi, juga memberikan sumbangan

bagi dunia ilmu pengetahuan.

Landasan Teori

Pengertian Penanaman Modal Asing

Dornbush, 1994, dalam “*Makro Ekonomi*” mengatakan investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal, stok barang modal (*capital stocks*) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi barang modal juga meliputi perumahan tempat tinggal dan juga persediaan. Investasi adalah pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen-komponen barang modal ini.

Hall Hill, 1991 dalam “*Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*” mengatakan dalam definisi yang dikatakan oleh IMF Balance of Payment Manual, investasi asing yang dimaksud tidak termasuk investasi portopolio di Indonesia, investasi seperti ini masih sangat kecil dari modal pinjaman, yang telah masuk ke Indonesia dalam jumlah besar sejak tahun 1966

Arti Penting Penanaman Modal Asing

Menurut Jhingan, 1994, penggunaan modal asing oleh negara berkembang dapat:

1. Membantu pembangunan-pembangunan yang sekaligus mengurangi kekurangan modal *overhead* ekonomi juga modal tersebut untuk menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah investasi, seperti proyek jalan raya, sungai, bendungan, rel kereta api ataupun infrastruktur yang lain, karena merupakan beban yang berat bagi negara berkembang untuk membangun semua itu tanpa dukungan modal asing.
2. Negara berkembang tidak sanggup mengawali industri-industri dasar dan industri-industri kunci secara sendiri-sendiri (membangun infrastruktur). Melalui modal asing mereka dapat mendirikan pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronika berat dan kimia. Lebih dari itu penggunaan modal asing pada suatu industri akan dapat mendorong perusahaan setempat dengan cara mengurangi biaya pada industri-industri lain yang dapat mengarah pada peluasan mata rantai industri lainnya. Dengan demikian Modal asing dapat membantu mengindustrialisasikan perekonomian Indonesia.
3. Keuntungan lain dari pemanfaatan modal asing adalah membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran yang dialami oleh negara berkembang akibat tidak seerasinya antara ekspor dan impor. Melalui modal asing, negara berkembang dapat memenuhi kebutuhan impornya dan pada saat yang bersamaan menghindari kesulitan dalam neraca perdagangan dan sekaligus menambah devisa untuk membayar utang luar negeri.

Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga menggambarkan biaya *opurtunitas* yaitu memengaruhi dalam bentuk hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan bunga. Tingkat suku bunga diproxy dengan tingkat suku bunga deposito berjangka 12 bulan pada bank-bank pemerintah yang dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang guna mendapat tingkat bunga tahunan. Selain itu, mengingat terdapat berbagai macam suku bunga yang saling berkaitan, maka pengukuran ini lebih ditekankan pada suku bunga deposito yang dapat mempengaruhi kegiatan investasi dan produksi.

Rumus yang digunakan :

$$Rdt = \frac{i_1 \sum D_1 + i_2 \sum D_2 + \dots + i_n \sum D_n}{\sum D_i}$$

Dimana : Rdt : r deposito tahun yang bersangkutan
 In : r deposito berjangka perjangka deposito
 Dn : posisi deposito berjangka perjangka waktu

Bertitik tolak dengan kenyataan bahwa tingkat bunga pinjaman sulit dipantau dan fluktuasi tingkat bunga deposito pada dasarnya sama dengan fluktuasi tingkat bunga pinjaman, maka ada baiknya apabila pada penelitian digunakan tingkat bunga deposito berjangka, bukan pada tingkat bunga pinjaman.

Tingkat Suku Bunga Luar Negeri

Ada berbagai macam indikator tingkat suku bunga yang berlaku secara Internasional antara lain *LIBOR (London Inter Bank Offer Rate)*, *SIBOR (Singapore Inter Bank Offer Rate)*, *US Prime Rate*, *Japan Prime Rate* dan *Germany Prime Rate*. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat suku bunga *Libor (London Inter Bank Offer Rate)* sebagai indikator analisisnya.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat *exhaustive* yaitu pembelian Barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang langsung dikonsumsi maupun dapat pula menghasilkan barang lain lagi, atau bersifat *transfer* saja, yaitu pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (*grants*), jadi *exhaustive expenditure* mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah, sedangkan *transfer payment* hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi yang lain dan membiarkan yang terakhir ini menentukan penggunaan dari uang tersebut. *Exhaustive expenditure* merupakan pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh swasta, misalnya bahan makanan, bangunan-bangunan, mesin-mesin tulis dan sebagainya dan dapat pula pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai negeri dan sebagainya.

Hubungan Tingkat Suku Bunga Dengan Penanaman Modal Asing

Jhingan, 1994, dalam "*Ekonomi Pembangunan*" mengatakan bahwa suku bunga yang tinggi dapat merupakan hambatan bagi pertumbuhan swasta maupun publik, oleh karena itu tingkat suku bunga rendah merupakan syarat penting untuk mendorong investasi swasta. Investor menanamkan modalnya untuk memproduksi barang dan jasa dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa mendatang.

Sadono Sukirno, 1993, dalam "*Pengantar Ekonomi Makro*" mengatakan bahwa tingkat suku bunga adalah faktor yang menentukan besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh masyarakat (swasta). Adapun hubungan antara tingkat bunga (r) dengan investasi adalah negatif. Menurunnya tingkat bunga (r) akan menaikkan permintaan investasi. Suku bunga yang tinggi dapat merupakan hambatan bagi pertumbuhan swasta maupun publik, oleh karena itu suku bunga rendah merupakan syarat penting untuk mendorong investasi swasta.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dengan Penanaman Modal Asing

Suparmoko, 1994, dalam "*Keuangan Negara*" mengatakan bahwa bagi negara sedang berkembang, kegiatan pemerintah pada umumnya selalu meningkat, karena pemerintah bertindak sebagai pelopor dan pengendali pembangunan. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran

pemrintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, tetapi sebenarnya proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Nopirin, 1994, dalam "*Ekonomi Moneter*" mengatakan bahwa efek kebijaksanaan fiskal terhadap kegiatan ekonomi ditunjukkan oleh *crowding out*, antara penambahan pengeluaran pemerintah terhadap kegiatan ekonomi. *Crowding out* yang sempurna adalah apabila Rp. 1,- pengeluaran pemerintah mengganti pengeluaran investasi swasta. Tidak sempurna apabila penggantian itu kurang dari Rp. 1,- dan *over crowding out* apabila penggantian/penurunan investasi swasta melebihi Rp. 1,-

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara kerja agar dapat memahami objek-objek yang menjadi sasaran atau tujuan dari penelitian.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah diolah dan beberapa data yang diperkirakan terlebih dahulu besarnya, yaitu penanaman modal asing dalam dollar, pengeluaran pemerintah dalam rupiah, suku bunga dalam dan luar negeri dalam persen. Data penelitian ini diperoleh dari Laporan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, *International Statistical Year Book*, Indikator Ekonomi, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, serta studi kepustakaan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Karena masing-masing sumber memiliki cara pengumpulan dan perhitungan yang berbeda, maka dilakukan penyesuaian dari setiap data yang digunakan, yaitu dengan menggunakan data tahunan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah metode regresi (diselesaikan dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square*), dimana model ini dipakai untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing sektor perindustrian di Jawa Tengah. Model estimasi menggunakan persamaan yang memuat variabel yang dijelaskan (*dependent variable*) Y dengan variabel penjelas (*independent variable*) x_1, x_2, x_3 sebagai Linier Stokastik, maka :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + ut \dots$$

Dimana:

Y : Variabel tak bebas (investasi swasta asing sektor perindustrian)

a : Parameter estimasi (konstanta)

b₁ : Parameter estimasi (elastisitas x_1 terhadap Y)

b₂ : Parameter estimasi (elastisitas x_2 terhadap Y)

b₃ : Parameter estimasi (elastisitas x_3 terhadap Y)

x_1 : Variabel bebas x_1 (Suku Bunga Dalam Negeri)

x_2 : Variabel bebas x_2 (Suku Bunga Luar Negeri)

x_3 : Variabel bebas x_3 (Pengeluaran Pemerintah)

Ut : Kesalahan Pengganggu (*disturbance error*)

Dengan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel ekonomi yang dianggap mampu untuk menerangkan masalah Penanaman Modal Asing sektor perindustrian di Jawa Tengah, sesuai teori dan disesuaikan dengan tujuan dan hipotesis penelitian,

maka model umum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut (Gujarati, 1992).

$$IS = f (SBDN, SBLN, PP)$$

Dimana:

- IS : Investasi Swasta Asing Sektor Perindustrian
- A : Konstanta
- SBDN : Suku Bunga Dalam Negeri
- SBLN : Suku Bunga Luar Negeri
- PP : Pengeluaran Pemerintah

Variabel Dummy

Dr.Gunawan Sumodiningrat,M.EC dalam Ekonometrika Pengantar mengatakan bahwa *variabel dummy* adalah variabel yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu 0 dan 1. *Variabel Dummy* biasanya digunakan dalam penelitian ekonometrika untuk mewakili faktor-faktor kualitatif; seperti : Jenis Pekerjaan, jenis kelamin, agama, politik, dan lain-lain.

$$Y = \alpha_0 + \beta X_i + u_i$$

X_i : Penanaman Modal Asing

Y : *Variabel Dummy*

u_i : Gangguan (*disturbance error*)

Realibilitas parameter yang diestimasi dapat dilihat melalui :

1. Kriteria Ekonomi, yang ditetapkan berdasarkan teori ekonomi.
2. Kriteria Statistik, yang meliputi uji signifikansi parameter secara individual (uji t) dan bersama-sama (uji F), serta kebaikan-sesuai (goodness of fit) (uji orde I)
3. Ekonometrika mengenai *variabel dummy* yang menguji variabel yang bersifat kualitatif.
4. Ketidakadaan penyimpangan terhadap asumsi-asumsi klasik, yaitu Autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Multikolinearitas (uji orde II).

Keterangan :

1. Uji orde I (Pengujian Secara Statistik)

A. Uji t

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen perlu dilakukan pengujian signifikansi dari masing-masing koefisien regresi, yaitu digunakan uji t, dengan tingkat signifikansi 95%. Apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka berarti variabel dependent tidak signifikansi terhadap variabel independen secara individu, demikian juga sebaliknya.

B. Uji F

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama digunakan uji F. Apabila F hitung lebih besar dari pada F tabel maka variabel independen signifikan secara bersama-sama, sebaliknya bila F hitung lebih kecil dari pada F tabel maka variabel independen tidak signifikan secara bersama-sama.

C. Perhitungan R Square (R^2)

Guna mengetahui kebaikan dari model di atas maka perlu dihitung koefisien determinasinya (R^2), yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan menerangkan dari variabel independen dengan variabel dependen pada fungsi tersebut (Supranto, 1983). Nilai dari R^2 ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$, Semakin besar nilai R^2 maka hubungan kedua variabel tersebut kuat atau model tersebut dikatakan baik.

2. Pengujian Secara Ekonometrika

A. Pendeteksian Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang “sempurna” atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model (Gujarati, 1993). Multikolinearitas dapat dideteksi kemungkinan terjadinya dengan kondisi sebagai berikut:

1. Ketika R^2 tinggi (antara 0.7 dan 1) dan ketika korelasi derajat nol meningkat
2. Ketika derajat nol rendah (kurang dari 0.5), dalam model meliputi 2 variabel/lebih yang menjelaskan korelasi sederhana.
3. Ketika dalam regresi sederhana Y atas x_1, \dots, x_n terdapat R^2 sangat tinggi tetapi korelasi derajat nol menurun (jika terdapat R^2 dan semua korelasi parsial cukup tinggi).
4. Ketika F hitung melebihi F kritis.

B. Pendeteksian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi tidak sepenuhnya asumsi homoskedastisitas. Untuk mendeteksinya, dapat digunakan metode grafik untuk mengetahui apakah nilai rata-rata yang ditaksir dari Y secara sistematis berhubungan dengan kuadrat residual. Jika tidak ada pola yang sistematis antara 2 variabel menyarankan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam data (Gujarati : 1993)

C. Pendeteksian Autokorelasi

Autokorelasi berarti korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (dalam data series). Dalam konteks regresi, gangguan. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan menghitung d -statistik dari Durbin Watson.

Nilai d -statistik yang diperoleh kemudian diuji dengan menggunakan nilai d tabel pada derajat kepercayaan tertentu, di dalam model tidak terdapat Autokorelasi jika nilai d -statistik terletak didalam daerah penerimaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Dalam perekonomian, penanaman modal sangat menunjang untuk pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja, oleh karenanya upaya pemerintah untuk menarik investor asing menginvestasikan modalnya di Jawa Tengah secara intensif perlu dilakukan.

Penanaman modal merupakan peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa *returns* yang akan diperoleh di masa akan datang akan lebih besar dari arus biaya. Penanaman modal diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru.

Tabel 4.1

Negara-negara yang dominan menginvestasikan modalnya di Jawa Tengah dan nilai investasi (ribu US dollar)

Tahun	Ranking			
	1	2	3	4

2006	Hongkong 38.750	Jepang 29.524	Taiwan 23.236	Singapura 12.481
2007	Jepang 728.230	Taiwan 23.236	Malaysia 15.170	Amerika Serikat 3153
2008	Malaysia 217.777	Belanda 28.960	Singapura 20.997	India 4000
2009	Inggris 3.002.900	Kanada 1.100.000	Hongkong 12.880	Singapura 12..349
2010	Hongkong 67.245	Inggris 9.180	Korea Selatan 5.670	Jepang 5500
2011	Inggris 17.344	Korea Selatan 5.975	Taiwan 5.350	Singapura 4.184

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Propinsi Jawa Tengah

Distribusi Penanaman Modal Asing Menurut Lokasi

Distribusi atau penyebaran penanaman modal menurut lokasi dapat mengindikasikan sejauh mana pemerataan pembangunan antar wilayah yang telah dicapai. Secara teoritis, penanaman modal dalam suatu wilayah sangat tergantung pada dua aspek. Aspek pertama adalah tersedianya sumber daya alam yang dapat diusahakan secara ekonomis (menguntungkan) di wilayah tersebut. Aspek kedua adalah tersedianya akses (kemudahan) untuk transportasi dan komunikasi, serta fasilitas-fasilitas lain di wilayah tersebut yang dapat mendukung mobilitasi modal, produk dan tenaga kerja. Kedua aspek ini mempengaruhi tingkat konsentrasi penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun asing di suatu wilayah.

Tabel 4.2

Lokasi yang Dominan Pada Penanaman modal asing di Jawa Tengah

Tahun	Ranking			
	1	2	3	4
2006	Kota Semarang	Kabptn Cilacap	Kabptn Banyumas	Kota Surakarta
2007	Kota Semarang	Kabptn Banyumas	Kabptn Cilacap	Kota Surakarta
2008	Kota Semarang	Kota Surakarta	Kabptn Banyumas	Kabptn.Cilacap
2009	Kota Semarang	Kabptn Banyumas	Kabptn Cilacap	Kota Surakarta
2010	Kota Semarang	Kaptn Cilacap	Kabptn Banyumas	Kabptn Kebumen
2011	Kota Semarang	Kabptn Banyumas	Kabptn Cilacap	Kota Surakarta

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah

Tingkat Suku Bunga Dalam Negeri

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat sorotan yang cukup tajam terhadap perkembangan dan tingkat suku bunga dalam negeri yang dianggap masih terlalu tinggi. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang wajar bila dilihat dari kepentingan pengusaha yang dalam melaksanakan kegiatannya pada umumnya banyak menggunakan kredit perbankan, namun di sisi lain, parapenabung dan deposan berkepentingan dengan suku bunga simpanan yang cukup menarik. Selain itu, mempertahankan daya beli uang yang disimpan, suku bunga menurut sudut pandang penabung dan deposan harus cukup menarik bila dibandingkan dengan alternatif penanaman dana lainnya. Dengan demikian, dalam sistem mekanisme pasar yang dianut di Indonesia termasuk Jawa Tengah sejak bulan juni tahun 2000, suku bunga yang terjadi mengalami fluktuasi dari kekuatan permintaan dan penawaran dana masyarakat. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa adanya kesenjangan antara

ketersediaan tabungan masyarakat dan kebutuhan investasi (*investment saving gap*) yang bersifat struktural, yang tercermin dari perkembangan transaksi berjalan yang umumnya mengalami defisit.

Dana perkembangan tingkat suku bunga deposito sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.3. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa tingkat suku bunga cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 suku bunga tertinggi adalah 22 persen dan suku bunga terendah adalah 12 persen kemudian pada tahun 2001 suku bunga tertinggi menurun sebesar 4 persen dan suku bunga terendah justru meningkat sebesar 2 persen dan pada tahun 2002 suku bunga tertinggi meningkat sebesar 3 persen dan suku bunga terendah meningkat sebesar 0,5 persen namun pada tahun 2004 dan 2005 tingkat suku bunga tertinggi mengalami stagnan yaitu 26 persen dan itu terjadi juga pada tahun 2006 dan 2007 tingkat suku bunga sebesar 18,5 persen. Sementara itu nilai tukar dollar terhadap rupiah cenderung tidak berubah, Kenaikan tingkat suku bunga cenderung menyebabkan penurunan penanaman modal swasta, paling tidak menimbulkan stagnan demikian juga dengan adanya kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah yang sangat tajam membuat nilai investasi swasta ikut menurun. Suku bunga di Indonesia termasuk Jawa Tengah,

Tabel 4.3
Perkembangan Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar dollar terhadap rupiah
Tahun 2000-2011(dalam rupiah dan persen)

Tahun	Nilai Tukar dollar terhadap rupiah	Tingkat suku bunga (dalam persen)		Naik/turunnya (+/-) sk.bunga(dalam persen)	
		Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
2000	1.729,-	22	12	-	-
2001	1.795,48	18,60	14	-3	-2
2002	1.901,-	18,12	14,5	+4	+0,5
2003	1.992,-	23,45	15,75	+3	1,25
2005	2.062,-	18,41	14	-	-1,75
2004	2.110,-	18,50	8	-11,5	-6
2005	2.200,-	15,50	9	+1	+1
2006	2.308,-	18,50	10,5	+3	+1,5
2007	5.383,-	18,50	11,66	-	+1,16
2008	10.650,-	30	11,26	+11,5	-0,40
2009	9.025,-	61	5,4	+31	-5,86
2010	9.100	46	10	-15	+4,6
2011	9.595	21,50	7,2	-24,5	-2,8

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah

Tingkat suku bunga yang telah ditetapkan pemerintah telah mengurangi hasrat bank-bank dalam mengerahkan dan memobilisasi dana masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu menghapuskan pagu kredit dan bank-bank pemerintah dibebaskan dalam menetapkan suku bunga deposito dan pinjaman untuk mencapai sasaran peningkatan pengerahan dan memobilisasi dana masyarakat. Peniadaan pagu kredit tersebut juga diharapkan akan mendorong bank-bank menyalurkan dana-dananya ke sektor-sektor yang produktif, oleh karena dengan dibebaskannya bank-bank bersaing dalam pemberian kredit diharapkan tidak akan terjadi distorsi pasar. Mekanisme pasar yang sehat akan mampu mengalokasikan dana secara efisien dan optimal.

Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, kemampuan perbankan dalam penerahan dana masyarakat telah meningkat. Untuk jelasnya perkembangan dana masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Perkembangan Dana Masyarakat (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Nilai Giro	Nilai Deposito	Nilai Tabungan	Total
1999	417.064	607.974	246.828	1.271.866
2000	599.763	839.063	527.766	1.966.592
2001	720.705	1.132.354	894.570	2.717.629
2002	838.588	1.996.402	1.293.853	4.128.843
2003	874.494	1.814.258	2.114.786	4.803.538
2004	1.124.128	1.940.728	2.912.877	5.977.733
2005	1.339.636	2.542.594	3.388.371	7.270.601
2006	1.585.526	3.493.560	4.047.692	9.126.778
2007	1.875.283	4.745.685	5.057.974	11.678.942
2008	2.365.993	5.568.311	5.660.218	13.584.522
2009	3.537.504	15.646.131	5.49.7156	24.833.350
2010	4.090.779	14.131.692	10.595.068	28.817.539
2011	3.642.882	12.582.355	19.624.686	35.849.923

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa dana masyarakat yang telah dikumpulkan oleh perbankan pada tahun 1999 posisinya adalah sebesar 1.271.866 juta telah melonjak menjadi 5.977.733 pada tahun 2004. Hal ini antara lain disebabkan dengan telah dinaikkannya tingkat suku bunga deposito oleh lembaga perbankan. Akan tetapi apabila kita meninjau dari segi perkembangan dunia usaha, maka perkembangannya belumlah cukup berarti bila dibandingkan dengan perkembangan dana masyarakat yang telah dikumpulkan. Hal ini dikarenakan oleh persaingan antar bank di Jawa Tengah masih sangat lemah dan juga-juga bank-bank pemerintah masih mendominasi kegiatan perbankan, antara lain berdasarkan ketentuan bahwa bank-bank pemerintah mempunyai monopoli atas dana-dana BUMN, selain itu juga karena berdasarkan ketentuan pada waktu itu, bahwa bank-bank baru tidaklah boleh didirikan. Akibatnya tingkat suku bunga pinjaman tetap tinggi dan menyulitkan dunia usaha untuk melakukan penanaman modal. Sehingga memerlukan kebijakan moneter guna meningkatkan efisiensi perbankan dalam penerahan dana ke sektor dunia usaha. Peningkatan penerahan dana perbankan dicapai dengan meniadakan pembatasan untuk mendirikan bank baru, kemudahan memperoleh ijin untuk menjadi bank devisa, serta perluasan daerah operasi bank-bank diseluruh Indonesia termasuk Jawa Tengah.

Setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, perubahan-perubahan besar terjadi di dalam dunia perbankan (adanya peningkatan jumlah bank di Indonesia termasuk Jawa Tengah). Persaingan yang ketat antar bank telah menyebabkan tingkat suku bunga deposito dan pinjaman menjadi menurun dan sektor swasta telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Untuk lebih jelasnya maka perkembangan dunia usaha dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Perkembangan Penanaman Modal dan Tingkat Suku Bunga Di Indonesia
(dalam persen)

Tahun	Tingkat bunga deposito	Tingkat bunga pinjaman	Penanaman Modal Dalam negeri
1999	17,76	19,6	1.164.173
2000	18,12	19,4	798.500
2001	18,12	20,3	5.799.281
2002	22,49	19,3	4.349.499
2003	18,62	17,9	2.339.772
2004	13,46	15,4	3.074.523
2005	12,13	14,25	3.243.931
2006	13,94	14,51	2.048.944
2007	16,03	15,08	1.901.448
2008	15,55	15,95	6.685.772
2009	22,44	19,51	2.482.396
2010	27,90	17,35	1.038.709
2011	15,54	16,3	1.495.586

Sumber: Statistik Keuangan Ekonomi Daerah Propinsi Jawa Tengah

Perkembangan dunia usaha sebelum dikeluarkannya pakto 27 oleh pemerintah sebesar 1.962.673 pada tahun 1988-1989, sedang dana masyarakat yang telah dikumpulkan lembaga perbankan pada tahun yang sama, yaitu sebesar 3.238.458 tahun 2004-2005, dan setelah dilakukannya pakto 27, maka perkembangan dunia usaha meningkat cukup tinggi yaitu 5.799.281 pada tahun 2001

Penurunan tingkat penanaman modal ini disebabkan oleh karena adanya tindakan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan uang ketat (*tight money policy*), dan secara teoritis *tight money policy* akan meningkatkan tingkat suku bunga deposito yang berarti juga meningkatkan tingkat bunga pinjaman, yaitu menjadi 20,3 persen per tahun, sehingga pada saat itu dunia usaha mengalami kesulitan dana untuk melakukan penanaman modal.

Walaupun pada saat dikeluarkannya kebijaksanaan uang ketat (*tight money policy*), pemerintah telah mewajibkan bank-bank untuk menyalurkan dananya sebesar 20 persen untuk kredit usaha kecil (KUK), tetapi tampaknya hal ini sulit tercapai mengingat tidak semua bank tersebut tidak mempunyai keahlian dalam penyaluran kredit usaha kecil.

Untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga pinjaman yang dapat menyulitkan sektor dunia usaha maka pemerintah terpaksa mengeluarkan lagi kebijaksanaan baru untuk meningkatkan persaingan antar bank, dengan tujuan agar tingkat suku bunga pinjaman menurun. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yg isinya mewajibkan seluruh bank memenuhi ketentuan *CAR (Capital Adequacy Ratio)* atau dengan kata lain mensyaratkan permodalan bank harus minimal 8 persen dari asset yang mengandung resiko. Sehingga bank-bank yang tidak dapat meningkatkan modalnya tidak dapat memacu pertumbuhan assetnya, akibat selanjutnya tingkat suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman menurun pada tahun 2003, yaitu sebesar 18,62 persen untuk tingkat bunga deposito dan 17,9 untuk tingkat suku bunga pinjaman.

Walaupun tingkat suku bunga pinjaman masih dapat dikatakan cukup tinggi, tetapi dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah dengan paket Februarinya telah cukup berhasil dalam menurunkan tingginya tingkat suku bunga pinjaman yang daapt menyulitkan sektor dunia usaha (Anwar Nasution, 1993).

Tingkat Suku Bunga Luar Negeri (LIBOR-London Inter Bank Offer Rate)

Tingkat bunga yang dipakai dalam penelitian ini adalah tingkat bunga internasional, yakni *LIBOR (London Inter Bank Offer Rate)*. Perkembangan *Libor* dalam

kurun waktu 1999-2011 dapat dilihat dalam tabel 4.6

Tabel 4.6
Perkembangan Tingkat Bunga Internasional
(dalam persen)

Tahun	LIBOR
1999	9,31
2000	8,37
2001	7,56
2002	5,88
2003	3,89
2004	3,32
2005	4,28
2006	6,04
2007	5,51
2008	5,84
2009	5,56
2010	5,42
2011	6,5

Pada kurun waktu ini, daapt dikatakan bahwa suku *libor* rata-rata perusahaan tahun masih berada di bawah dua digit, yang disinyalir akibat adanya resesi yang melanda dunia di era 90-an. Suku bunga *Libor* memperlihatkan tidak adanya peningkatan yang berarti, hanya saja pada tahun 2002 hingga ahun 2003 memperlihatkan kecenderungan menurun hingga meningkat kembali sampai tahun 2006. Penurunan suku bunga *Libor* juga terjadi pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan suku bunga tersebut berkaitan dengan penerapan kebijakan moneter yang longgar di beberapa negara industri utama, seperti Jerman dan Jepang dalam dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah tren jangka panjang.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan. Pengeluaran rutin dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai;; belanja perjalanan dinas; angsuran hutang/pinjaman dan bunga; dan lain-lain. Pengeluaran pembangunan dialokasikan ke berbagai sektor yang ada ayitu pertanian dan kehutanan; industri; pertambangan dan energi; perhubungan dan telkom daerah; agama; pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional; perumahan dan pemukiman dan lain-lain. Dari seluruh pengeluaran pemerintah, pembengkakan pengeluaran terjadi dalam sektor angsuran hutang/pinjaman dan bunga. Sebab persoalan pinjaman/hutang luar negeri terasa bagi pemerintah Jawa Tengah dengan adanya resesi dunia serta anjloknya harga minyak.

Tabel 4.7
Pengeluaran Pemerintah (dalam miliar rupiah)

Tahun	Total pengeluaran
1999	456,90
2000	516,28
2001	580,78
2002	677,48
2003	810,18

2004	998,80
2005	1.092,61
2006	1.260,54
2007	1.460,14
2008	1.420,37
2009	587,72
2010	796,44
2011	638,40

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah

Kondisi di atas mendorong diberlakukannya kebijakan deregulasi guna mengubah struktur ekonomi Jawa Tengah. Kebijakan tersebut meliputi upaya pengetatan konsumsi daerah dan pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor yang kurang penting, meningkatkan daya saing melalui devaluasi, deregulasi sektor moneter untuk meningkatkan peran swasta serta resceduling proyek.

Dengan usaha yang dilakukan pemerintah maka alokasi untuk dana untuk menyediakan fasilitas dasar dan bantuan proyek penanaman modal asing dapat terealisasi sehingga industri-industri baru dapat bertumbuh dan berkembang. Tingkat suku bunga yang diproksi dengan tingkat suku bunga deposito berjangka 12 bulan pada bank-bank pemerintah yang dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang guna mendapatkan tingkat bunga tahunan; Tingkat suku bunga luar negeri berdasarkan persentase suku bunga yang berlaku secara internasional yaitu *libor* (*london inter bank offer rate* dalam jangka waktu 3 bulan); pengeluaran pemerintah berdasarkan nilai realisasi kualitatif yaitu situasi politik dengan menggunakan analisis variabel dummy. Dalam penulisan ini digunakan empat variabel, yaitu empat variabel independent yaitu variabel tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat suku bunga luar negeri, pengeluaran pemerintah dan satu variabel dependent yaitu penanaman modal asing sektor perindustrian di Jawa Tengah. Pada analisis ini akan diperhitungkan apakah terdapat pengaruh yang nyata antar masing-masing variabel independent dengan variabel dependent pada taraf (α) = 5 persen

Dari hasil estimasi terhadap model dengan program SPSS seperti pada lampiran, karena menggunakan variabel kualitatif yaitu variabel dummy maka persamaan harus dibedakan .

Dengan persamaan sebagai berikut:

Sebelum krisis:

$$\begin{aligned} Y &= -2652,333 + 74,859X_1 + 77,830X_2 + 0,143X_3 + 1129,114D \\ &= -2652,333 + 74,859X_1 + 77,830X_2 + 0,143X_3 + 1129,114 \quad (1) \\ &= -1523,219 + 74,589X_1 + 77,830X_2 + 0,143X_3 \end{aligned}$$

Sesudah krisis:

$$\begin{aligned} Y &= -2652,219 + 74,859X_1 + 77,830X_2 + 0,143X_3 + 1129,114D \\ Y &= -2652,219 + 74,859X_1 + 77,830X_2 + 0,143X_3 + 1129,114(0) \\ Y &= -2652,219 + 74,859X_1 + 77,830X_2 + 0,143X_3 + 0 \\ Y &= -2652,219 + 74,859X_1 + 77,830X_2 + 0,143X_3 \end{aligned} \quad (2)$$

Keterangan:

Y = Penanaman modal asing sektor perindustrian

X₁ = Tingkat suku bunga dalam negeri

X₂ = Tingkat suku bunga luar negeri

X₃ = Pengeluaran pemerintah

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Statistik dengan tingkat signifikansi 5 persen

R Square : 0,56
 T-Stat : 1. Tingkat suku bunga dalam negeri : 0,017
 2. Tingkat suku bunga luar negeri : 0,619

3. Pengeluaran Pemerintah : 0,847

Hasil analisis dari penelitian ini adalah:

1. Uji statistik dengan signifikansi 5 persen

a. Uji t

- Tingkat suku bunga dalam negeri : 0,017
- Tingkat suku bunga luar negeri : 0,619
- Pengeluaran pemerintah : 0,847

2. Uji F

F Hitung > F Tabel

$$F \text{ Hitung} : \frac{R^2 \times (n - k)}{R^2 \times (k - 1)}$$

$$\frac{0,561 \times (13 - 4)}{0,561 \times (4 - 1)}$$

$$\frac{0,561 \times 9}{0,561 \times 3} = \frac{5,049}{1,683} = 2,99$$

$$= 2,99$$

F Tabel : 3,86

Simpulan: F Hitung < F Tabel

C. Perhitungan R^2

Semakin tinggi nilai R^2 semakin baik model tersebut. Terlihat bahwa nilai R^2 pada model ini adalah 0,561 atau 56,1 persen. Imam Ghozali (1988) mengatakan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik, alasannya bila suatu estimasi regresi linear menghasilkan koefisien determinasi tetapi tidak konsisten dengan teori ekonometrika yang dipilih atau tidak lulus dari uji asumsi klasik maka model tersebut bukan model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empiris

Maka perlu melihat pengujian ekonometrika atau uji asumsi klasik:

1. Multikolinearitas

Suatu model dikatakan baik apabila tidak terdapat multikolinearitas atau bebas multikolinearitas. Multikolinearitas dapat diuji dengan melihat:

- Nilai tolerance > 0,1 atau 10 persen

Dalam penelitian ini dapat dilihat nilai tolerance :

1. Tingkat suku bunga dalam negeri : 0,440
2. Tingkat suku bunga luar negeri : 0,856
3. Pengeluaran pemerintah : 0,782

Simpulan : dari keempat variabel *independen* nilai tolerance yang diperoleh > 0,1

- Nilai VIF < 10

1. Tingkat suku bunga dalam negeri : 2,274
2. Tingkat suku bunga luar negeri : 1,168
3. Pengeluaran pemerintah : 1,278

2. Uji Autokorelasi

Model yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel *independen*. Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan sebagai berikut :

- $Dw < D_l$

Terdapat autokorelasi positif

- $Dw > (4 - D_l)$

Terdapat autokorelasi negatif

$$- \quad Du < Dw < (4-Du)$$

Tidak terdapat autokorelasi

$$-Du < Dw < D1$$

Tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak.

Berdasarkan tabel diperoleh:

$$D1 : 0,574 \quad Du : 2,004 \quad 4-Du : 1,996 \quad 4-D1 : 3,426 \quad Dw : 2,486$$

Hasilnya adalah: $0,574 < 2,486 < 3,426$

Tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak

Selain itu autokorelasi dapat dilihat dengan nilai autokorelasi antar variabel *independen*. Bila nilai korelasi variabel *independen* satu dengan variabel *independen* lainnya $> 0,5$. Jika terdapat nilai variabel *independen* $> 0,5$ maka salah satu variabel *independen* harus dikeluarkan dari model.

Dari lampiran terlihat bahwa variabel tingkat suku bunga dalam negeri Maka variabel Dummy yang dikeluarkan dari model tersebut. Setelah variabel *Dummy* dikeluarkan maka persamaan model regresi linear berganda dengan tiga variabel *independen* adalah:

$$Y = -1.527,13 + 49,124X1 + 102,397X2 + 0,435X3$$

1. Uji Statistik dengan signifikansi 5 persen

a. Uji t

Tingkat suku bunga dalam negeri : 0,025, Tingkat suku bunga luar negeri : 0,533,

Pengeluaran pemerintah : 0,566

Dapat dilihat dari 3 variabel *independen* hanya tingkat suku bunga dalam negeri yang signifikan dengan nilai 0,025

b. Uji F

F Hitung $>$ F Tabel

$$F \text{ Hitung} : \frac{R^2_x(N-K)}{R^2_x(k-1)}$$

$$\frac{0,447x(13-3)}{0,447x(3-1)} = \frac{0,447x 10}{0,447x 2}$$

$$\frac{4,47}{0,898} = 4,97$$

F Tabel : 4,1

Simpulan : F Hitung $>$ F Tabel

C. Perhitungan R^2

Semakin tinggi nilai R^2 semakin baik model tersebut. Terlihat bahwa nilai R^2 pada model ini adalah 0,447 atau 44,7 persen.

Imam Ghozali (1998) mengatakan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik, alasannya bila suatu estimasi regresi linear menghasilkan koefisien determinasi tinggi tetapi tidak konsisten dengan teori ekonometrika yang dipilih atau tidak lulus dari uji asumsi klasik maka model tersebut bukan model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empiris.

Maka perlu melakukan pengujian ekonometrika atau uji asumsi klasik:

1. Multikolinearitas

a. Suatu model dikatakan baik apabila tidak terdapat multikolinearitas atau bebas multikolinearitas. Multikolinearitas dapat diuji dengan melihat pada:

- Nilai tolerance $>$ 0,1 atau 10 persen

Dalam model ini dapat dilihat nilai tolerance : Tingkat suku bunga dalam negeri : 0,911., Tingkat suku bunga luar negeri : 0,867., Pengeluaran pemerintah : 0,850

Dari ketiga variabel *independen* nilai tolerance yang diperoleh $> 0,1$

- Nilai VIF < 10

Tingkat suku bunga dalam negeri : 1,098., Tingkat suku bunga luar negeri :
1,133., Pengeluaran pemerintah : 1,177

2. Uji Autokorelasi

Model yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel *independen*, uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin watson sebagai berikut:

- Dw $< D_l$ Terdapat autokorelasi positif
- Dw $> (4-D_l)$ Terdapat autokorelasi negatif
- Du $< D_w < (4-D_u)$ Tidak terdapat autokorelasi
- Du $< D_w < D_l$ Tidak dapat disimpulkan apakah ada autokorelasi atau tidak

Berdasarkan tabel diperoleh:

D_l : 0,715 D_u : 1,816 $4-D_u$: 2,184 D_w : 2,004
 $D_u < D_w < (4-D_u)$ $1,816 < 2,004 < 2,184$ berarti tidak terdapat autokorelasi

Selain itu dapat dilihat nilai korelasi antar variabel *independen*. Bila nilai korelasi variabel independen satu dengan variabel independen lainnya $> 0,5$ maka salah satu variabel bebas harus dikeluarkan dari model.

Dari lampiran terlihat bahwa tidak ada variabel *independen* yang berkorelasi kuat dengan variabel *independen* lainnya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Model dikatakan baik apabila tidak terdapat heteroskedastisitas atau bebas heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji plots.

Simpulan:

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Fluktuasi tahunan atas penanaman modal asing pada sektor perindustrian disebabkan oleh adanya perekonomian Jawa Tengah yang tidak stabil, dan pekanya perubahan kebijakan pemerintah terhadap penanaman modal asing
2. Dari hasil analisis yang pertama secara statistik diketahui bahwa model yang digunakan memang tidak terlalu baik untuk menerangkan perubahan-perubahan penanaman modal asing sektor perindustrian namun pada hasil analisis yang kedua perhitungan tersebut secara statistik baik namun bila di uji autokorelasi tidak berhasil lolos dan jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhita Prawatyo dan Riya Suharnata ada pengaruh faktor-faktor tersebut pada investasi asing.
3. Penanaman modal asing di Jawa Tengah pada sektor perindustrian mempunyai pengaruh positif dengan tingkat suku bunga luar negeri dan juga pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif yang berarti bahwa pembangunan infrastuktur baik fisik maupun sosial dapat diwujudkan dengan mengalami peningkatan melalui pengeluaran pemerintah yang semakin besar.

Saran-saran:

Dari keseluruhan hasil penelitian ini, maka dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Dunia perbankan hendaknya memberi peranan yang berarti dalam memobilisasi dana untuk penanaman modal asing di Jawa Tengah Pada sektor perindustrian untuk mendorong terjadinya iklim penanaman modal dengan tingkat bunga yang relatif rendah bagi investor asing dari bunga deposito yang cukup insentif.

2. Diperlukan prioritas dan selektifitas dalam pengeluaran pemerintah sehingga infrastruktur dapat tersedia untuk menciptakan pertumbuhan penanaman modal asing di Jawa Tengah pada sektor perindustrian.
3. Untuk mendorong meningkatnya penanaman modal asing sektor perindustrian perlu lebih mencermati alokasi pengeluaran dalam infrastruktur mengingat penyebaran penanaman modal asing di Jawa Tengah pada sektor perindustrian belum merata hanya terfokus di beberapa tempat saja yaitu Semarang, Banyumas, Cilacap, dan Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, TW, October 1989, "Determinan of Private Investment in Developing Countries", **Journal of Development**, Vol.19. No. 1
- Adhita Prawaty, 1994, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia, 1969-1990, Yogyakarta
- Anton H Gunawan, Agustus 1999, "Mengkaji Pengalaman Masa lalu dan Mengagas Masa Depan, Suatu Pengantar Diskusi Mengenai Persoalan Ekonomi ", Jurnal CSIS. Jakarta
- A.Toni, Prasetyantono, September 1990, "Suatu Pemikiran tentang Perbaikan Investasi di Indonesia", Jurnal CSIS, Jakarta.
- Bank Indonesia, Laporan Tahunan, berbagai edisi.
- _____, Statistik Keuangan Indonesia, berbagai edisi.
- Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi, berbagai edisi.
- Dornbush, R and Stanley F, 1997, Makroekonomi, Alih bahasa : Julius A. Mulyadi, Jakarta : Erlangga.
- Gunawan Sumodiningrat, 1994, Ekonometrika Pengantar, Yogyakarta: BPFE
- Gujarati, Damodar, 1991, Ekonometrika Dasar, Alih bahasa: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga
- Hill, Hall, 1991, Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia, Jakarta: LP3ES
- Imam Ghozali, 2001, Aplikasi Analisis Multivarrate dengan Program SPSS, Semarang
- Jhingan, Ml, 1994, Ekonomi Pembangunan, Alih bahasa: D.Guritno, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kuntjaraningrat, 1973, Metode Penelitian, Yogyakarta.
- Supranto J, 1983, Statistik, Jakarta: Erlangga.
- Mulia Nasution, 1997, Teori Ekonomi Makro Pendekatan pada Perekonomian Indonesia, Jakarta: Jambetan.
- Nopirin, 1998, Ekonomi Moneter, Jakarta: BPFE
- Sadono. Sukirno, 1994, Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta: Bina Grafika.
- Suparmoko, 1994, Keuangan Negara, Jakarta: BPFE